



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 71 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2016-2021

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 ((Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Sekretaris Daerah, selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sebagai badan legislatif daerah.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain, selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Cianjur.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan,

mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah
16. IKU pemerintah kabupaten adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah kabupaten Cianjur.
17. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD, sebagaimana tertuang dalam Renstra PD Tahun 2016-2021.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
21. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tujuan penetapan IKU meliputi:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

(1) Ruang Lingkup IKU terdiri dari :

- a. IKU Pemerintah Kabupaten; dan
- b. IKU Perangkat Daerah

(2) IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **17 Oktober 2019**
Plt. BUPATI CIANJUR,



Herman
HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal **17 Oktober 2019**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



Aban Subandi
ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN **2019** NOMOR **71**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 71 TAHUN 2019
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016-2021

| ISI | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TIPE PERHITUNGAN | RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER |
|--|--|---|-------------|------------------|---|--------------------------------------|
| 1 : 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur daerah | 1.1.1 Persentase kondisi mantap jalan kabupaten | % | Kumulatif | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap dibagi panjang jalan kabupaten kali 100% | Dinas Pekt Umum dan Penataan |
| | | 1.1.2 Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat | % | Kumulatif | Jumlah ketersediaan air baku dibagi jumlah kebutuhan air baku kabupaten dikali 100% | Dinas Perku Kawas Permukiman Pertana |
| | | 1.1.3 Persentase rumah layak huni | % | Kumulatif | Jumlah rumah layak huni dibagi total jumlah rumah dikali 100% | Dinas Perku Kawas Permukiman Pertana |
| | | 1.2.1 Indeks kualitas pencemaran air | Poin | Kumulatif | $PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2 + (C_i/L_{ij})^2}{2}}$ | Dinas Lingl Hidup |
| 2 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 1.2.2 Indeks kualitas pencemaran udara | Poin | Kumulatif | $= 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{Eu} - 0,1) \right)$ | Dinas Lingl Hidup |
| | | 1.2.3 Indeks tutupan lahan | Poin | Kumulatif | $ITH = \frac{LHP + LHS}{LKH}$ | Dinas Lingl Hidup |
| 2 : 2. Meningkatkan pembangunan keagamaan | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia | 2.1.1 Persentase penerimaan zakat infaq sodaqoh | % | Kumulatif | Realisasi penerimaan zakat infak sodakoh tahun n dibagi target tahun 2021 kali 100% | Sekretariat |
| | | 2.1.2 Jumlah konflik antar umat beragama | kali | Non Kumulatif | Realisasi jumlah konflik antar umat beragama pada tahun n | Badan Kess Bangsa dan |
| 3 : 3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | 3.1.1 Indeks pendidikan | Poin | Kumulatif | I HLS ditambah I RLS dibagi 2 | Dinas Pendd dan Kebud |
| 2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 3.2.1 Indeks kesehatan | Poin | Kumulatif | (AHH dikurangi AHHmin) dibagi (AHHmax dikurangi AHHmin) | Dinas Kesse |
| 3 | Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi | 3.3.1 Nilai investasi PMA/PMDN | Rp. Trilyun | Non Kumulatif | Realisasi jumlah investasi PMA/PMDN pada tahun n | Penanaman dan Pelay Terpadu Sat |

| MISI | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TIPE PERHITUNGAN | RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER |
|------|--|--|------------------------------|--|---|---|
| 3.4 | Meningkatnya ekonomi sektor agribisnis dan pariwisata | 3.4.1 Nilai PDRB sektor industri pengolahan 3.4.2 Nilai PDRB sektor pariwisata 3.4.3 Nilai PDRB sektor pertanian | % % % | Non Kumulatif Non Kumulatif Non Kumulatif | Realisasi PDRB sektor industri pada tahun n Realisasi PDRB sektor pariwisata pada tahun n Realisasi PDRB sektor pertanian pada tahun n | Bapp Bapp Bapp |
| 3.5 | Terwujudnya kemandirian ekonomi daerah berbasis kerakyatan | 3.5.1 Purchasing Power Parity (paritas daya beli) | Poin | Non Kumulatif | Metode Perhitungan paritas daya beli menggunakan metode Rao dengan memasukkan 96 komoditas | BPS dan E |
| 3.6 | Mantapnya ketahanan pangan masyarakat | 3.6.1 Skor Pola Pangan Harapan | Poin | Kumulatif | Jumlah skor AKE setelah verifikasi dari 9 kelompok pangan | Dinas Per Perkebunan dan Horti |
| 3.7 | Menurunnya angka kemiskinan | 3.7.1 Persentase penduduk miskin 3.7.2 Tingkat pengangguran terbuka | % % | Kumulatif Kumulatif | Jumlah penduduk miskin tahun n dibagi jumlah total penduduk kabupaten dikali 100% Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100% | Bapp Bapp |
| 3.8 | Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel | 3.8.1 Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | Poin | Kumulatif | Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang | Sekretariat |
| 3.9 | Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik | 3.9.1 Opini BPK 3.9.2 Nilai LPPD 3.9.3 Nilai evaluasi SAKIP 3.9.4 Nilai Maturitas SPIP | Poin Poin Poin Poin | Non Kumulatif Non Kumulatif Non Kumulatif Non Kumulatif | Hasil pemeriksaan audit eksternal (BPK) tahun n-1 Hasil evaluasi LPPD tahun n-1 Hasil evaluasi SAKIP tahun n-1 Hasil Evaluasi Maturitas SPIP | Badan Pen Keuangan Daer Sekretariat Sekretariat Inspek |

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal

Pt. BUPATI CIANJUR

HERMAN SUHERMAN



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TIPE PERHITUNGAN | RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|---|--|--|-------------------------|-----------|--|--|-------------|
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | |
| PENDIDIKAN | | | | | | | |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Layanan Pendidikan Anak Usia Dini | Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD | Persen | Kumulatif | Jumlah siswa jenjang PAUD Usia 3-5 tahun dibagi Jumlah Penduduk Usia 3-5 tahun x 100Persen | Bidang PAUD Pendidikan Formal dan Kebudayaan | |
| 2 | Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan dasar Formal dan non Formal | Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD | Persen | Kumulatif | Jumlah Siswa 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk 7-12 tahun x 100Persen | Bidang Pendidikan Sekolah Dasar | |
| | | Jumlah Kepemilikan Ijazah Kesetaraan | Persen | Kumulatif | Jumlah Siswa yang Lulus Ujian Kesetaraan dibagi jumlah siswa peserta ujian kesetaraan X 100Persen | Bidang PAUD Pendidikan Formal dan Kebudayaan | |
| | | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP | Persen | Kumulatif | Jumlah siswa SMP usia 13-15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun x100Persen | Bidang Sekolah Menengah Pertama | |
| 3 | Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi Pendidik dan tenaga Kependidikan | Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik | Persen | Kumulatif | Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik dibagi jumlah guru yang ada x 100Persen | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | |
| 4 | Terjaganya kelestarian cagar budaya dan Kesenian daerah | Jumlah cagar budaya yang dilestarikan | Persen | Kumulatif | Jumlah cagar budaya yang dipelihara dibagi jumlah seluruh cagar budaya x 100 Persen | Bidang PAUD Pendidikan Formal dan Kebudayaan | |
| | | Jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya | Persen | Kumulatif | Penyelenggaraan event kesenian dibagi rencana penyelenggaraan event kesenian x 100Persen | Bidang PAUD Pendidikan Formal dan Kebudayaan | |
| KESEHATAN | | | | | | | |
| DINAS KESEHATAN | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat | Persentase desa siaga aktif | Persen | Kumulatif | Jumlah desa yang melaksanakan program desa siaga aktif dibagi jumlah total desa dikali 100% | Bidang Kesehatan Masyarakat | |
| 2 | Meningkatnya kualitas layanan kesehatan | jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran | bayi | Kumulatif | Jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran | Bidang Kesehatan Masyarakat | |
| | | Jumlah Kematian Ibu per 100.000 kelahiran | ibu | Kumulatif | Jumlah kematian ibu per 100.000 ibu melahirkan | Bidang Kesehatan Masyarakat | |
| | | Persentase Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | Persen | Kumulatif | Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan dibagi jumlah gizi buruk dikali 100% | Bidang Kesehatan Masyarakat | |
| | | Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan | Persen | Kumulatif | Jumlah kepuasan masyarakat terhadap yang pelayanan kesehatan dibagi jumlah masyarakat terhadap dikali 100% | Bidang Pelayanan Kesehatan | |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TYPE PERHITUNGAN | RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|--|----------------------|---|---|--------------------------------------|--|--|---|
| 3 | | Meningkatnya Upaya Pencegahan Pemberantasan Pengendalian Penyakit serta Penyehatan lingkungan | Cakupan Desa ODF Cakupan Desa UCI Penemuan Penderita Baru TB BTA + berkurang Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa | Persen Persen Persen Persen | Kumulatif Kumulatif Kumulatif Kumulatif | Jumlah desa yang melaksanakan Desa ODF dibagi jumlah Desa dikali 100% Jumlah desa yang melaksanakan UCI dibagi total jumlah desa dikali 100% Jumlah penangananan pasien baru TB BTA+ dibagi kasus TB BTA+ dikali 100% Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dibagi total jumlah puskesmas dikali 100% | Bidang Kesehatan Masyarakat Bidang pencegahan pemberantasan dan pengendalian penyakit Bidang pencegahan pemberantasan dan pengendalian penyakit |
| 4 | | Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan Sesuai dengan Standar | Jumlah puskesmas yang sudah terakreditasi | Persen | Kumulatif | Jumlah puskesmas yang sudah terakreditasi | Bidang Pelayanan Kesel |
| RSUD SAYANG | | | | | | | |
| 1 | | Meningkatnya mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang | Capaian Akreditasi RS | Persen | Non Kumulatif | Jumlah elemen penilaian yang memenuhi standar / Jumlah elemen penilaian akreditasi x 100% | Sub Bagian Data, Informa Penelitian dan Pengemb |
| RSUD CIMACAN | | | | | | | |
| 1 | | Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD Cimacan | Peringkat Akreditasi Persentase SPM yang tercapai | Rasio Persen | Kumulatif Kumulatif | 1. Dasar : dari 15 Bab yang disurvei hanya 4 Bab yang mendapat nilai >80Persen 2. Madya : dari 15 bab yang disurvei ada 8 Bab yang mendapat nilai ? 80Persen 3. Jumlah SPM yang memenuhi target / Jumlah Seluruh SPM x 100Persen | Bagian Tata Usaha, Bi Pelayanan Medis, Bid Keperawatan Bagian Penunjang Medis, Keperawatan, Bidang Pel Medis |
| RSUD PAGELARAN | | | | | | | |
| 1 | | Meningkat nya kualitas pelayanan kesehatan dan rujukan Rumah Sakit | Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target tahun berjalan Persentase elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS tahun berjalan | Persen Persen | Kumulatif Kumulatif | (Jumlah indikator SPM RS yang mencapai target tahun berjalan)/(Jumlah seluruh indikator SPM RS) x 100Persen (Jumlah elemen akreditasi pelayanan yg memenuhi standar akreditasi RS tahun berjalan) x100Persen/ (Jumlah seluruh elemen akreditasi pelayanan yang ada) | Laporan Tahunan Laporan Tahunan |
| PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | |
| 1 | | Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian rakyat | Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari Persentase luas areal irigasi kabupaten yang terairi melalui jaringan irigasi | Persen Persen | Non Kumulatif Kumulatif | Jumlah ketersediaan air baku (m3) dibagi Jumlah kebutuhan air baku (m3) dikali 100Persen Jumlah air irigasi yang dialiri selama 1 tahun (m3) dibagi Jumlah kebutuhan air irigasi selama 1 tahun (m3) dikali 100Persen | Bidang Sumber Daya Bidang Sumber Daya |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TYPE PERHITUNGAN | RUM US PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|--|----------------------|---|---|--------|------------------|---|---|
| 2 | | Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana di wilayah manajemen Kebakaran (W/MK) | Persentase penanganan bencana bahaya kebakaran | Persen | Non Kumulatif | Jumlah kejadian kebakaran yang dilaporkan/Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani x 100Persen | Bidang Damkar |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | |
| 1 | | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Wawasan kebangsaan, pendidikan politik masyarakat dan kewaspadaan dini daerah terhadap potensi konflik | Persentase kelompok masyarakat yang meningkat pemahamannya mengenai Wawasan Kebangsaan dan pendidikan politik | % | Non kumulatif | Jumlah masyarakat yang dibina / Jumlah masyarakat yang direncanakan akan dibina selama 5 tahun | Bidang Ideologi Negara Wawasan Kebangsaan |
| | | | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu | % | Non kumulatif | Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) / jumlah suara sah dan tidak sah | Bidang Politik Dalam N |
| | | | Jumlah konflik sosial | kali | Non kumulatif | Jumlah konflik - Penyelesaian = 0 | Bidang Kewaspadaan l Daerah |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | | |
| 1 | | Meningkatnya Mitigasi Dan Pengendalian Bencana Secara Terpadu | Persentase daerah rawan bencana yang dibina | Persen | Kumulatif | Jumlah Desa Tangguh Bencana/ Jumlah Desa Rawan Bencana x 100% | Bidang Pencegahan d Kesiapsiagaan |
| | | | Cakupan Penanggulangan Bencana Alam | Persen | Non Kumulatif | Jumlah korban bencana yang ditangani/ Jumlah Korban Bencana x 100% | Bidang Kedaruratan dan l |
| | | | Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | Persen | Kumulatif | Jumlah objek terdampak yang ditangani/ jumlah seluruh objek terdampak x 100% | Bidang Rehabilitasi d Rekonstruksi |
| | | | Cakupan Pendidikan dan Pengurangan Risiko Bencana Tingkat Sekolah | Persen | Kumulatif | Jumlah sekolah aman bencana yang terbentuk/ Jumlah sekolah di daerah rawan bencana x 100% | Bidang Pencegahan d Kesiapsiagaan |
| SOSIAL | | | | | | | |
| DINAS SOSIAL | | | | | | | |
| 1 | | Menurunnya angka kemiskinan | Presentase PMKS yang tertangani | Persen | | | Bidang pelayanan da rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial bantuan perlindungan s |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | |
| TENAGA KERJA | | | | | | | |
| DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | | | | |
| 1 | | Meningkatnya penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja | Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (formal/informal) | Persen | Non Kumulatif | Jumlah penempatan pencari kerja terdaftar tahun n dibagi jumlah pencari kerja terdaftar tahun n dikali 100Persen. | Bidang Penempatan Ter kerja dan Pengembangan Perluasan Kesempatan |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TIPE PERHITUNGAN | RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|--|------------------------------------|---|--|---------------|--|---|--|
| 2 | | Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja | Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial yang ditangani | Persen | Non Kumulatif | Jumlah penyelesaian kasus Hubungan Industrial diluar Pengadlan Hubungan Industrial dibagi Jumlah kasus yang dicatat dikali 100 Persen | Bidang Hubungan Industri Jaminan Sosial Tenaga |
| 3 | | Terwujudnya penempatan transmigran di wilayah transmigrasi | Persentase penempatan transmigran | Persen | Kumulatif | Jumlah transmigran yang ditempatkan sampai tahun n dibagi jumlah target penempatan transmigran pada Akhir Periode dikali 100 | Seksi Transmigrasi pada Kelembagaan, Pelatihan Produktivitas dan Trans |
| LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | |
| 1 | | Terpeliharanya Kualitas Air | Persentase jumlah sungai dengan status sungai baik | Persen | Kumulatif | Jumlah sungai yang meningkat kondisi baik / jumlah sungai yang dipantau x 100% | Bidang TL dan Bidang I |
| 2 | | Terpeliharanya Kualitas Udara | Baku mutu kualitas udara | Indeks | Non Kumulatif | Kategori indeks pencemaran udara | Bidang TL dan Bidang |
| 3 | | Meningkatnya Penanganan Sampah | Persentase penanganan sampah kabupaten | Persen | Non Kumulatif | Volume sampah yang ditangani / timbunan sampah x 100% | Bidang PSL |
| ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | |
| 1 | Penataan Administrasi Kependudukan | Persentase dokumen kependudukan yang di terbitkan kartu keluarga | Persen | Kumulatif | Jumlah penduduk yang memiliki KK dibagi Jumlah penduduk dikali 100% | | Bidang Dafuk |
| | | Persentase dokumen kependudukan yang di terbitkan KTP elektronik | Persen | Kumulatif | Jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi Jumlah penduduk wajib KTP (>17 atau pernah/sudah menikah) dikali 100% | | Bidang Dafuk |
| | | Persentase dokumen kependudukan akte kelahiran yang diterbitkan | Persen | Kumulatif | Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran dibagi Jumlah Penduduk dikali 100% | | Bidang Capil |
| | | Persentase dokumen kependudukan akte kematian yang diterbitkan | Persen | Kumulatif | Jumlah kematian yang diterbitkan dibagi Jumlah kematian dalam satu tahun dikali 100% | | Bidang Capil |
| | | Persentase penyesuaian data penduduk antara data disdukecapil dengan data pusat | Kecamatan | Non Kumulatif | Jaringan yang terpasang di 32 Kecamatan | | Bidang PIK |
| | | Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh instansi dan perangkat daerah | Dokumen | Non Kumulatif | Terpasangnya aplikasi | | Bidang Pemanfaatan I |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TIPE PERHITUNGAN | RUM US PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|--|---|---|-------------------------|---------------|---|--|-------------|
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | |
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Keberdayaan lembaga perekonomian Masyarakat desa | Persentase Bumdesa Sehat | Persen | Kumulatif | Target unit Bumdesa/354 unit yang seharusnya ada di 354 desa x 100 | Bidang Pemberdayaan Desa | |
| 2 | Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pembangunan | Persentase desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Persentase peningkatan status Perkembangan Desa berdasarkan kategori Profil Desa dan Kelurahan | Persen | Non Kumulatif | 354 desa target/354 total desa x 100 Selisih target desa swasembada tahun berjalan dengan jumlah desa swasembada tahun dasar/jumlah desa swasembada tahun dasar x 100 | Bidang Bina Keuangan dan Desa Bidang Tata Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa | |
| PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | |
| DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB | Angka kelahiran total per WUS (15-49 tahun) | Anak | Non Kumulatif | banyaknya bayi lahir menurut kelompok umur wanita, untuk menyusun indikator ini diperoleh juga dari Sakernas, SUPAS dan Sensus Penduduk | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | |
| 2 | Meningkatnya pemberdayaan perempuan | Kategori Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) | Predikat | Non Kumulatif | empat kategori penerima penghargaan APE yaitu Pratama, Utama, Madya dan Mentor. dinilai dari 7 (tujuh) Komponen Kunci, terdiri dari : Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Tingkat Pratama apabila kota/kabupaten mendapat 500-600 poin, Madya dengan 600-700 poin, Nindya dengan 700-800 poin, Utama dengan nilai 800-900 poin, dan tingkat | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 3 | Meningkatnya perlindungan hak-hak anak | Kategori Kabupaten Layak Anak | Predikat | Non Kumulatif | | | |
| PERHUBUNGAN | | | | | | | |
| DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat | Persentase Penyediaan Sarana, Prasarana dan fasilitas Perhubungan | Persen | Kumulatif | Realisasi Jumlah Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan / Σ Target Jumlah Kebutuhan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan) X Persen | Bidang Angkutan dan Transportasi | |
| 2 | Meningkatnya Pelayanan Bidang Perhubungan Darat | Persentase Kendaraan Umum/Barang Laik Jalan di Kabupaten Cianjur | Persen | Non Kumulatif | Realisasi Jumlah wajib uji / Σ Target Jumlah wajib uji) X 100 Persen | Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan | |
| | | Persentase Perwujudan Transportasi Yang Aman, Nyaman dan Berkeselamatan | Persen | Non Kumulatif | Realisasi pelaksanaan transportasi yang aman, nyaman dan berkeselamatan / Σ target pelaksanaan transportasi yang aman, nyaman dan berkeselamatan) X 100 Persen | Bidang Lalu Lintas dan EBTeknik Sarana dan Keselamatan | |
| KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | |
| DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya ketersediaan media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan | Cakupan pelayanan diseminasi informasi dan komunikasi publik melalui media | Persen | Kumulatif | Jumlah persentase jenis pelayanan diseminasi informasi dan komunikasi publik | Bidang Komunikasi dan Informasi Publik | |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TYPE PERHITUNGAN | RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|---|----------------------|--|---|--------|------------------|--|--|
| 2 | | Meningkatnya ketersediaan dan akses data statistik | Persentase Penyediaan Data Sektoral dan Data Statistik | Persen | Kumulatif | Jumlah Persentase Kelengkapan Data dan konten Aplikasi Terkini | Bidang Data dan Statistik |
| 3 | | Meningkatkan Layanan Pemerintahan dan Publik Berbasis Elektronik | Indeks Keamanan Informasi | Skor | Kumulatif | Skor Indeks Keamanan Informasi | Bidang Persandian dan Informatika |
| | | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Skor | Kumulatif | Skor Indeks SPBE | Bidang Persandian dan Informatika |
| KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | | | |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | | | | | | | |
| 1 | | Meningkatnya Kapasitas KUMKM | Persentase UMKM yang tumbuh | Persen | Kumulatif | Jumlah UMKM Tahun N + (n-1) / Jumlah UMKM x 100 % | Bidang Koperasi UK |
| | | | Persentase Koperasi Aktif | Persen | Kumulatif | Jumlah Koperasi Aktif Tahun N + (n-1) / Jumlah Koperasi x 100 % | Bidang Koperasi UK |
| | | | Persentase Pasar Rakyat yang representatif | Persen | Kumulatif | Jumlah Pasar yang direvitalisasi Tahun N + (n-1) / Jumlah Pasar Rakyat x 100 % | Bidang Perdagangan |
| | | | Persentase Alat UTPP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang ditera | Persen | Kumulatif | Jumlah Alat UTPP yang ditera Tahun N + (n-1) / Jumlah Potensi Alat UTPP x 100 % | Bidang Perdagangan |
| 2 | | Meningkatnya kualitas pelaku usaha dan produk IKM | Persentase SDM IKM bersertifikat | Persen | Kumulatif | Jumlah IKM yang dibina Tahun N + (n-1) / Jumlah IKM x 100 % | Bidang Perindustria |
| | | | Persentase Produk IKM tersertifikasi | Persen | Kumulatif | Jumlah Komoditi Produk Disertifikasi Tahun N + (n-1) / Jumlah IKM x 100 % | Bidang Perindustria |
| PENANAMAN MODAL | | | | | | | |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | | |
| 1 | | Meningkatnya pelayanan perizinan untuk meningkatkan investasi | persentase peningkatan jumlah perizinan yang diterbitkan | Persen | Non Kumulatif | Jumlah izin terbit - jumlah pemohon izin / jumlah pemohon izin di kali 100Persen | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu |
| KEARSIPAN | | | | | | | |
| DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH | | | | | | | |
| 1 | | Meningkatnya Minat Baca Masyarakat | Jumlah Pemustaka Per Tahun | Orang | Kumulatif | Jumlah pemustaka yang datang ke perpustakaan | Bidang Perpustakaan |
| 2 | | Meningkatnya pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah daerah | Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku | PD | Kumulatif | Jumlah PD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku | Bidang Kearsipan |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TIPE PERHITUNGAN | RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|------------------------|--|--|-------------------------|---------------|---|---|-------------|
| KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | |
| | DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN | | | | | | |
| | Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan | Persentase Peningkatan Hasil Tangkapan Nelayan | Persen | Non Kumulatif | ((Jumlah Hasil Tangkapan Tahun ini - Jumlah Hasil Tangkapan Tahun sebelumnya/ Jumlah Hasil Tangkapan Tahun Sebelumnya)) x 100 % | Bidang Kelautan dan Perikanan dan Bidang Pemberdayaan Kelernbagaan | |
| | | Persentase Peningkatan Produksi Hasil Perikanan Budidaya | Persen | Non Kumulatif | ((Jumlah Produksi Hasil Perikanan Budidaya Tahun ini - Jumlah Produksi Hasil Perikanan Budidaya Tahun Sebelumnya/ Jumlah Produksi Hasil Perikanan Budidaya Tahun Sebelumnya)) x 100 % | Bidang Kelautan dan Perikanan dan Bidang Pemberdayaan Kelernbagaan | |
| | Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) | Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Persen | Non Kumulatif | ((Jumlah Produksi Hasil Peternakan Tahun ini - Jumlah Produksi Hasil Peternakan Tahun Sebelumnya/ Jumlah Produksi Hasil Peternakan Tahun Sebelumnya) x 100 % | Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan | |
| | | Persentase Produk Hasil Peternakan yang layak konsumsi | Persen | Non Kumulatif | ((Jumlah Sampel Yang Lulus Uji Layak konsumsi / Jumlah Sampel yang diperiksa)) x 100 % | Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
| PARIWISATA | | | | | | | |
| | DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Daya Tarik Wisata | Persentase destinasi wisata yang tertata | Persen | | | | |
| 2 | Meningkatnya Atlit yang Mengikuti Event Olahraga | Persentase atlit pelajar dan ASN yang mtenapatkan mndali | Persen | | | | |
| 3 | Meningkatnya peran serta organisasi kepemudaan | Persentase organisasi kepemudaan yang aktif | Persen | Non Kumulatif | Jumlah Organisasi Kepemudaan Yang aktif dibagi Jumlah Organisasi yang ada di kali 100 | Bidang Kepemudaan dan Olahraga | |
| PERTANIAN | | | | | | | |
| | DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN,PANGAN DAN HORTIKULTURA | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan | Angka Ketersediaan Pangan (kkal/kep) | Kg | Non Kumulatif | Jumlah ketersediaan pangan (ton) dikonversikan ke nilai energi (kkal) dibagi jumlah penduduk | Bidang Ketahanan Pangan | |
| | | Capaian Stabilitas Harga Pangan Pokok Strategis (%) | Persen | Non Kumulatif | Stabilitas harga ditentukan oleh Koefisiensi Keragaman (CV) yang diperoleh dari Rata-rata harga pangan dibagi Standar Deviasi dikali 100% | Bidang Ketahanan Pangan | |
| | | Angka Konsumsi Pangan (kkal/kep) | Kg | Non Kumulatif | Jumlah konsumsi pangan per kapita dikonversi ke satuan nilai gizi | Bidang Ketahanan Pangan | |
| 2 | Meningkatnya produksi tanaman pertanian | Produksi Tanaman Pangan | Ton | Kumulatif | Produksi Tanaman Pangan diperoleh dari penjumlahan produksi komoditas : Padi, Jagung, Kacang tanah dan Ubi Kayu pada tahun ke-n dalam satuan ton | Bidang Produksi Tanaman Pangan | |
| | | Produksi Tanaman Hortikultura | Ton | Kumulatif | Produksi Tanaman Hortikultura diperoleh dari penjumlahan produksi komoditas : Wortel, Cabe Besar, Bawang Daun, | Bidang Produksi Tanaman Perkebunan | |
| | | Produksi Tanaman Perkebunan | Ton | Kumulatif | Produksi Tanaman Perkebunan diperoleh dari penjumlahan produksi 25 komoditas tanaman perkebunan (tahunan, penegar, rempah, dan semusim) pada tahun ke-n dalam satuan ton | Bidang Produksi Tanaman Perkebunan | |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TIPE PERHITUNGAN | RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|---|---|--|---|---------------|---|---|--|
| 3 | | Meningkatnya usaha dan Sumberdaya Manusia (SDM) pertanian | Jumlah Kelompok Tani yang melakukan Pola Usaha Agribisnis | Kelompok | Kumulatif | Jumlah Kelompok Tani yang melakukan pola usaha agribisnis pada tahun ke-n | Bidang Bina Usaha Agribisnis dan Penyuluhan |
| | | | Jumlah Kelompok Tani yang Kelasnya Naik | Kelompok | Kumulatif | Jumlah Kelompok Tani yang kelasnya naik pada tahun ke-n | Bidang Bina Usaha Agribisnis dan Penyuluhan |
| URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | |
| PERENCANAAN | | | | | | | |
| BAPPEDA | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras | Tingkat kesesuaian prioritas Pembangunan RKPD dengan prioritas Pembangunan RPJMD | Persen | Non kumulatif | Jumlah program prioritas pembangunan dalam RKPD yang sesuai dengan prioritas pembangunan RPJMD / Jumlah program prioritas pembangunan dalam RPJMD x 100Persen | | Bidang Pemsosbud, Bidang Ekinfra, Bidang Litbang |
| | | Tingkat kesesuaian target Program Renstra PD terhadap target Program RPJMD | Persen | Non kumulatif | Jumlah target program dalam Renstra PD yang sesuai dengan target program dalam RPJMD / Jumlah target program RPJMD x 100Persen | | Bidang Pemsosbud, Bidang Ekinfra, Bidang Litbang |
| | | Tingkat kesesuaian target kegiatan Renja PD terhadap target prioritas Pembangunan RKPD | Persen | Non kumulatif | Jumlah target kegiatan dalam Renja PD yang sesuai dengan target kegiatan dalam RKPD / jumlah target kegiatan dalam RKPD x 100Persen | | Bidang Pemsosbud, Bidang Ekinfra, Bidang Litbang |
| | | Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam RKPD | Persen | Non kumulatif | Jumlah usulan musrenbang yang diakomodir dalam RKPD / jumlah usuan musrenbang x 100Persen | | Usulan musrenbang, RKPD |
| 2 | Meningkatnya penelitian pengembangan daerah yang dilaksanakan | Persentase jumlah PD yang melaksanakan kegiatan dalam program kegiatan | Persen | Non kumulatif | Jumlah PD yang melaksanakan kegiatan dalam program kegiatan / jumlah total seluruh PD x 100Persen | | Bidang Litbang |
| KEUANGAN | | | | | | | |
| BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Penetapan Anggaran yang tepat waktu | Persentase pengajuan aset tanah yang disertifikasi dari target yang ditetapkan | Persen | Kumulatif | Jumlah Realisasi ajuan Bidang Tanah yang akan disertifikasi dibagi Jumlah Target Bidang tanah yang ditetapkan dikali 100% | | Bidang Akuntansi dan |
| | | Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu | Waktu | Non Kumulatif | Realisasi penetapan waktu penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD | | Bidang Akuntansi dan |
| | | Persentase pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan daerah yang tertib | Persen | Kumulatif | Jumlah Realisasi Dokumen Pencairan Belanja Daerah dibagi Jumlah Target Dokumen Pencairan Belanja Daerah dikali 100% | | Bidang Perbendahara |
| | | Penetapan Perda APBD Tepat Waktu | Waktu | Non Kumulatif | Realisasi penetapan waktu penyusunan Perda APBD | | Bidang Anggaran |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TIPE PERHITUNGAN | RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|---|----------------------|--|--|--------|------------------|---|---|
| 1 | | BADAN PENGELOLAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Daerah Terhadap Target Yang Ditetapkan Persentase Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Daerah Terhadap Target Yang Ditetapkan | Persen | Kumulatif | Realisasi/target x 100% Realisasi/target x 100% | Bidang PBB dan BPHTB, Potensi Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Bidang Penagihan Pajak Daerah |
| KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH | | | | | | | |
| | | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH | | | | | |
| 1 | | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Persentase Pegawai ASN yang memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Karir Persentase ASN yang lulus dalam Peningkatan Kompetensi melalui Diklat maupun Pendidikan Formal dengan Nilai Baik | Persen | Non Kumulatif | Jumlah ASN yang lulus DIKLAT dibagi jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT dikali 100 persen | Bidang Pendidikan dan Pelatihan |
| | | | Persentase ASN yang telah mendapatkan Pembinaan dan Kesejahteraan | Persen | Non Kumulatif | Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan dan Kesejahteraan dibagi Jumlah ASN yang diajukan untuk mendapatkan Pembinaan dan Kesejahteraan dikali seratus persen | Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan |
| PENGAWASAN | | | | | | | |
| | | INSPEKTORAT | | | | | |
| 1 | | Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa | Pemenuhan 5 Unsur SPP setiap Perangkat Daerah (Dinas/Badan/Satuan/RS UD) Nilai Maturitas Kapabilitas APP | Poin | Non Kumulatif | Hasil Evaluasi Rata-rata Maturitas 5 Unsur SPP Setiap Perangkat Daerah (Dinas/Badan/Satuan/RSUD) Hasil Evaluasi Maturitas Kapabilitas APP | Inspektur Pembantu Wilayah dan III Inspektur Pembantu Wilayah dan III |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TIPE PERHITUNGAN | RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|------------------------|---|---|--|---------------|---|--|-----------------------------------|
| | | | Peningkatan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/ Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, APP (Kementerian, Provinsi dan Kabupaten) | Persen | Kumulatif | Total Temuan/Rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi Total Temuan/ Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dikali seratus | Inpektur Pembantu Wilayah dan III |
| | | | Persentase Temuan BPK tentang Kepatuhan Auditi terhadap Peraturan Perundang-Undangan | Persen | Non Kumulatif | Total Temuan/Rekomendasi tentang Kepatuhan dibagi Total Temuan/ Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dalam Tahun berjalan dikali seratus (persen) | Inpektur Pembantu Wilayah dan III |
| KECAMATAN | | | | | | | |
| KECAMATAN AGRABINTA | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya Pelayanan Kepada Masyarakat Secara Optimal | Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada OPD terkait | Persen | Non Kumulatif | Jumlah OPD yang terlayani dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100% | | AGRABINTA |
| | | Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Jumlah masyarakat yang terlayani di bagi jumlah masyarakat yang mengajukan pelayanan dikali 100% | | AGRABINTA |
| KECAMATAN BOJONGPICUNG | | | | | | | |
| | Terwujudnya pelayanan yang optimal | Pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait | Persen | Non Kumulatif | Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu | | BOJONGPICUNG |
| | | Pemenuhan pelayanan kepada masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu | | BOJONGPICUNG |
| KECAMATAN CAMPAKA | | | | | | | |
| | Meningkatkan pelayanan public yang transparan dan akuntabel | Pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait | Persen | Non Kumulatif | Jumlah Fungsi yang dilaksanakan dibagi total fungsi yg harus dilaksanakan dikali 100Persen | | CAMPAKA |
| | | Pemenuhan Pelayanan kepada Masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Jumlah Fungsi yang dilaksanakan dibagi total fungsi yg harus dilaksanakan dikali 100Persen | | CAMPAKA |
| KECAMATAN CAMPAKAMULYA | | | | | | | |
| | Meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel | Pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait | Persen | Non Kumulatif | Jumlah OPD yang terlayani dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100 persen | | CAMPKAMULYA |
| | | Pemenuhan pelayanan kepada masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Jumlah masyarakat yang terlayani dibagi jumlah masyarakat yang mengajukan pelayanan dikali 100 persen | | CAMPKAMULYA |
| KECAMATAN CIANJUR | | | | | | | |
| | Terwujudnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel | Presentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait | Persen | Non Kumulatif | Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu | | CIANJUR |
| | | Presentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu | | CIANJUR |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TIPE PERHITUNGAN | RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----|-------------------------|---|---|--------|---------------------|--|-------------|
| | | KECAMATAN CIBEBER | | | | | |
| | | Meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel | Persentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait | Persen | Non Kumulatif | Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu | CIBEBER |
| | | | Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Pelayanan kepada masyarakat tepat waktu | CIBEBER |
| | | KECAMATAN CIBINONG | | | | | |
| | | Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal | Persentase pemenuhan pelayanan kepada PD terkait | Persen | Non Kumulatif | Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu | CIBINONG |
| | | | Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Pelayanan kepada masyarakat tepat waktu | CIBINONG |
| | | KECAMATAN CIDAUN | | | | | |
| | | Terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat menyangkut nilai-nilai akhlakul karimah | Tersosialisasikan dan terbinanya aparat Kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara | | | | CIDAUN |
| | | Terselenggara-nya kuantitas dan kualitas pelayanan yang memuaskan | Rasio jml masy yg puas atas pelayanan yg diberikan dibandingkan jml yang dilayani | | | | |
| | | | Waktu pelayanan | | | | |
| | | Terselenggara-nya perencanaan pemba-ngunan keca-matan yg partisipatif | Jml. Kelompok Masyarakat yg terwakili dalam musrenbang RKPd di Kec. | | | | |
| | | Terselengga-ranya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangun-an oleh kecamatan | Jml keg yang dimonev dibandingkan jml keg yang ada di lingk kec ybs | | | | |
| | | | Prosentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti pemkab | | | | |
| | | Terlaksananya pengembangan sektor unggulan di bidang agribisnis di Kecamatan | Jumlah sektor unggulan yang dipromosikan | | | | |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TIPE PERHITUNGAN | RUM US PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----|---|--|---|---------------|--|--------------------|---------------|
| | | Termanfaatkannya potensi alam yang ada dengan sumber daya manusia yang tersedia didukung lembaga yang ada di Kecamatan | Jumlah destinasi wisata berbasis potensi alam | | | | |
| | KECAMATAN CIJATI | | | | | | |
| | Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal | Pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait | Persen | Non Kumulatif | Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu | | CIJATI |
| | | Pemenuhan pelayanan kepada masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu | | CIJATI |
| | KECAMATAN CIKADU | | | | | | |
| | Meningkatkan pelayanan public yang transparan dan akuntabel | Pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait | Persen | Non Kumulatif | Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu | | CIKADU |
| | | Pemenuhan pelayanan kepada masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu | | CIKADU |
| | KECAMATAN CIKALONGKULON | | | | | | |
| | Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat secara optimal | Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada OPD Terkait | Persen | Non Kumulatif | Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu | | CIKALONGKULON |
| | | Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Pelayanan kepada masyarakat tepat waktu | | CIKALONGKULON |
| | KECAMATAN CILAKU | | | | | | |
| | Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal | Pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait | Persen | Non Kumulatif | Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu | | CILAKU |
| | | Pemenuhan pelayanan kepada masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Pelayanan kepada masyarakat tepat waktu | | CILAKU |
| | KECAMATAN CIPANAS | | | | | | |
| | Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal | Persentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait | Persen | Non Kumulatif | Jumlah OPD yang terlayani dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100% | | CIPANAS |
| | | Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Jumlah masyarakat yang terlayani di bagi jumlah masyarakat yang mengajukan pelayanan dikali 100% | | CIPANAS |
| | KECAMATAN CIRANJANG | | | | | | |
| | Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal | Pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait | Persen | Non Kumulatif | Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu | | CIRANJANG |
| | | Pemenuhan pelayanan kepada masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu | | CIRANJANG |
| | KECAMATAN CUGENANG | | | | | | |
| | Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal | Pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait | Persen | Non Kumulatif | Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu | | CUGENANG |
| | | Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu | | CUGENANG |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TIPE PERHITUNGAN | RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----|-------------------------|---|---|--------|---------------------|--|--------------|
| | | KECAMATAN GEKBRONG | | | | | |
| | | Meningkatkan pelayanan public yang transparan dan akuntabel | Pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait Pemenuhan Pelayanan kepada Masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Jumlah Fungsi yang dilaksanakan dibagi total fungsi yg harus dilaksanakan dikali 100Persen | GEKBRONG |
| | | KECAMATAN HAURWANGI | | | | | |
| | | Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal | Pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait Pemenuhan pelayanan kepada masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu | HAURWANGI |
| | | KECAMATAN KADUPANDAK | | | | | |
| | | Terwujudnya Pelayanan kepada Masyarakat yang Optimal | Pemenuhan Pelayanan kepada OPD terkait Pemenuhan Pelayanan kepada Masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Jumlah fungsi yang dilaksanakan dibagi total fungsi yang harus dilaksanakan dikali 100Persen | KADUPANDAK |
| | | KECAMATAN KARANGTENGAH | | | | | |
| | | Meningkatkan pelayanan public yang transparan dan akuntabel | Pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait Pemenuhan Pelayanan kepada Masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Jumlah Fungsi yang dilaksanakan dibagi total fungsi yg harus dilaksanakan dikali 100Persen | KARANGTENGAH |
| | | KECAMATAN LELES | | | | | |
| | | Meningkatnya pelayanan public yang transparan dan akuntabel | Pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait Pemenuhan pelayanan kepada masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu | LELES |
| | | KECAMATAN MANDE | | | | | |
| | | Terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat menyangkut nilai-nilai keimanan dan ketagwaan | Tersosialisasikan dan terbinanya aparat kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai keimanan dan ketagwaan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara | | | | MANDE |
| | | | Tkt kriminalitas Tkt konflik sosial Tkt KDRT Konfl antar umat beragama Pelaks. Etika sosial budaya Jml pelanggaran sebakankergugan negara | | | | |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TYPE PERHITUNGAN | RUM US PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----|-------------------------|---|--|--------|---------------------|---|-------------|
| | | Terselenggara-nya kuantitas dan kualitas pelayanan yang memuaskan | Rasio jml masy yg puas atas pelayanan yg diberikan dibandingkan jml yang dilayani | | | | |
| | | Terselenggara-nya perencanaan pembangunan kecamatan yg partisipatif | Jml. Kelompok Masyarakat yg mewakili dalam musrenbang RKPD di Kec. | | | | |
| | | Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk usaha ekonomi local | Prosentase masyarakat usaha yang sadar akan daya tarik, daya saing, dan daya tahan produk usaha ekonomi local | | | | |
| | | Terselenggara-ranya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan oleh kecamatan | Jml keg yang dimonev dibandingkan jml keg yang ada di lingk kec ybs | | | | |
| | | Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya melalui keterkaitan antar kelompok usaha | Jumlah kelompok usaha ekonomi local yg menunjukkan keterkaitan antara kemampuan SDA, tenaga kerja, dan , modal | | | | |
| | | KECAMATAN NARINGGUL | | | | | |
| | | Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal | Pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait | Persen | Non Kumulatif | Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu | NARINGGUL |
| | | | Pemenuhan pelayanan kepada masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu | NARINGGUL |
| | | | | | | | |
| | | KECAMATAN PACET | | | | | |
| | | Meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel | Pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait | Persen | Non Kumulatif | Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu | PACET |
| | | | Pemenuhan pelayanan kepada masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Pelayanan kepada masyarakat tepat waktu | PACET |
| | | KECAMATAN PAGELARAN | | | | | |
| | | Terwujudnya Pelayanan kepada Masyarakat yang Optimal | Persentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait | Persen | Non Kumulatif | Jumlah Fungsi yang dilaksanakan dibagi total fungsi yg harus dilaksanakan dikali 100% | PAGELARAN |
| | | | Persentase pemenuhan pelayanan kepada Masyarakat | | | | |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TYPE PERHITUNGAN | RUM US PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----|-------------------------|---|---|--------|---------------------|--|--------------------------------|
| | | KECAMATAN PASIRKUDA | | | | | |
| | | Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal | Persentase pemenuhan pelayanan kepada OPD Persentase pemenuhan pelayanan kepada Masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu | PASIRKUDA |
| | | KECAMATAN SINDANGBARANG | | | | | |
| | | Terwujudnya Pelayanan Kepada Masyarakat Secara Optimal | Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada OPD Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Jumlah OPD yang terlayani dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100% Jumlah masyarakat yang terlayani di bagi jumlah masyarakat yang mengajukan pelayanan dikali 100% | SINDANGBARANG |
| | | KECAMATAN SUKALUYU | | | | | |
| | | Terseleenggaranya kuantitas dan kualitas pelayanan yang memuaskan | Cakupan fungsi kecamatan yang dilaksanakan sesuai aturan | Persen | Non Kumulatif | jumlah fungsi yg dilaksanakan dibagi total fungsi yg hrs dilaksanakan dikali 100% | SUKALUYU |
| | | KECAMATAN SUKANAGARA | | | | | |
| | | Meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel | Pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait Pemenuhan Pelayanan kepada Masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Jumlah Fungsi yang dilaksanakan dibagi total fungsi yg harus dilaksanakan dikali 100 Persen Jumlah Fungsi yang dilaksanakan dibagi total fungsi yg harus dilaksanakan dikali 100 Persen | SUKANAGARA SUKANAGARA |
| | | KECAMATAN SUKARESMI | | | | | |
| | | Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal | Pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait Pemenuhan pelayanan kepada masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu | SUKARESMI |
| | | KECAMATAN TAKOKAK | | | | | |
| | | Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal | Pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait Pemenuhan pelayanan kepada masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu | TAKOKAK TAKOKAK |
| | | KECAMATAN TANGGEUNG | | | | | |
| | | Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal | Pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait Pemenuhan pelayanan kepada masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Terpenuhi target pelayanan sesuai tepat waktu Pelayanan Kepada masyarakat tepat waktu | TANGGEUNG TANGGEUNG |
| | | KECAMATAN WARUNGKONDANG | | | | | |
| | | Terwujudnya Pelayanan Kepada Masyarakat yang Optimal | Persentase Pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat | Persen | Non Kumulatif | Terpenuhinya target pelayanan sesuai tepat waktu Pelayanan kepada masyarakat tepat waktu | WARUNGKONDANG WARUNGKONDANG |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TIPE PERHITUNGAN | RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|----|-------------------------|---|---|---------------|---|---|--|
| | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | |
| 1 | | Meningkatnya Kesadaran terhadap nilai-nilai keagamaan di masyarakat | Peningkatan Jumlah Pemberi zakat infak sodagoh | Orang | Non Kumulatif | Jumlah Pemberi zakat infak sodagoh | Bagian Kesra |
| | | Percentase kehadiran ASN yang mengikuti /melaksanakan gerakan subuh berjamaah dan ashar mengaji ditingkat kabupaten dan kecamatan | Persen | Non Kumulatif | Jumlah ASN laki-laki yang hadir dibagi jumlah ASN laki-laki keseluruhan dikali 100 % | | Bagian Kesra |
| | | Percentase Mesjid yang mengikuti gerakan subuh berjamaah dan asar mengaji ditingkat kabupaten dan kecamatan | Persen | Non Kumulatif | Jumlah Mesjid yang mengikuti gerakan subuh berjamaah dan ashar mengaji dibagi jumlah mesjid se Kabupaten Cianjur dikali 100 % | | Bagian Kesra |
| | | Percentase lembaga keagamaan yang mendapat bantuan | Persen | Non Kumulatif | Jumlah lembaga keagamaan yang diverifikasi dan mendapat bantuan tahun berjalan dibagi jumlah total lembaga keagamaan yang diverifikasi dan mendapat | | Bagian Kesra |
| 2 | | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah | Ketepatan waktu penyampaian laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah | Waktu | Non Kumulatif | Tepat Waktu dengan batas akhir 31 Desember Tahun berjalan dan 31 Maret Tahun berikutnya | Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan, Bagian Ur dan Keuangan |
| | | Percentase BUMD yang berkinerja baik | Persen | Non Kumulatif | Jumlah BUMD yang berkinerja baik dibagi Jumlah keseluruhan BUMD dikali 100 % | | Bagian Perekonomian dan Investasi |
| | | Percentase ketersediaan sarana dan prasarana Setda yang representatif | Persen | Kumulatif | Jumlah sarana prasarana yang tersedia dibagi jumlah total sarana dan prasarana dikali 100% | | Bagian Umum dan Keuan |
| 3 | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pemerintah | Percentase penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan | Persen | Kumulatif | Jumlah pelayanan pengadaan barang/jasa dibagi jumlah total pelayanan pengadaan barang/jasa dikali 100 % | Bagian Barang dan Jasa |
| | | Percentase MOU kerjasama daerah yang ditindaklanjuti | Persen | Kumulatif | Jumlah MoU kerjasama daerah dibagi jumlah total MoU kerjasama daerah dikali 100 % | | Bagian Pemerintahan |
| | | Percentase Perkara Hukum yang selesai ditangani | Persen | Kumulatif | Jumlah perkara hukum yang diselesaikan dibagi jumlah total perkara hukum dikali 100 % | | Bagian Hukum |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TIPE PERHITUNGAN | RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|-------------------------|-------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|---|--|
| | | | Persentase Kebijakan daerah yang ditindaklanjuti Persentase informasi daerah yang dipublikasikan. | Persen Persen | Kumulatif Non Kumulatif | Jumlah kebijakan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total kebijakan dikali 100 % Jumlah informasi daerah dipublikasikan tahun N dibagi jumlah total kinformasi daerah yang dipublikasikan dikali 100 % | Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan, Bagian Ke- Bagian Hukum, Bagian Per- ekonominian, Bagian Ba- Bagian Humas |
| SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | |
| 1 | | SEKRETARIAT DPRD | | Persen | Non kumulatif | Jumlah pelayanan kepada anggota DPRD / jumlah pelayanan kepada anggota DPRD yang seluruhnya x 100% | Bagian Persidangan c Perundang-Undangan, E Umum, Bagian Perencana Keuangan |
| | | Meningkatnya pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya | Persentase pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya | | | | |



HERMAN SUHERMAN

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 17 Oktober 2019
 Pt. BUPATI CIANJUR